



Efektivitas Program Kali Bersih (PROKASIH) di Tukad Bindu Kelurahan Kesiman Kota Denpasar

I Putu Adi Permana Putra

Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana, Universitas Warmadewa, Denpasar
diegho.permana@gmail.com

Abstract

The Clean River Program (PROKASIH) is a government policy in an effort to overcome pollution problems and maintain the preservation of environmental functions. Environmental problems, especially river pollution in Indonesia, are the reason for the need to maintain the function of waters to support development and improve human welfare. The purpose of this study is to assess the performance of policies to determine the effectiveness of the Clean River Program in overcoming the problem of river pollution. The research method used is a qualitative descriptive approach with data collection techniques through non-participatory observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the implementation of the Clean River Program in Tukad Bindu, Kesiman Sub-district, Denpasar City is very effective. The effectiveness of the implementation of this program can be seen from the accuracy of policies in overcoming pollution problems in Tukad Bindu; target accuracy in program implementation; the accuracy of the implementation as proven through the synergy between the government, the private sector, and the local community; environmental accuracy as seen from the disposition and contribution of the community; accuracy of the process in complying with applicable rules and division of tasks; as well as the benefits obtained by the local community in the implementation of the Clean River Program as well as changes in behavior in maintaining and developing Tukad Bindu. The successful implementation of this program requires efforts to strengthen the institutional system in overcoming the problem of river pollution as well as optimizing community empowerment in realizing sustainable environmental management.

Keywords: *effectiveness; kali bersih program; river bindu*

Abstrak

Program Kali Bersih (PROKASIH) merupakan kebijakan pemerintah dalam upaya mengatasi masalah pencemaran dan menjaga pelestarian fungsi lingkungan. Permasalahan lingkungan khususnya pencemaran sungai di Indonesia menjadi alasan perlunya menjaga fungsi perairan guna menunjang pembangunan dan peningkatan kesejahteraan manusia. Tujuan dari penelitian ini ialah menilai kinerja kebijakan untuk mengetahui efektivitas Program Kali Bersih dalam mengatasi masalah pencemaran sungai. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi non-partisipatif, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Kali Bersih di Tukad Bindu Kelurahan Kesiman Kota Denpasar sangat efektif. Efektifitas pelaksanaan program ini terlihat dari ketepatan kebijakan dalam mengatasi permasalahan pencemaran di Tukad Bindu; ketepatan target dalam pelaksanaan program; ketepatan pelaksanaan yang dibuktikan melalui sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat setempat; ketepatan lingkungan yang terlihat dari disposisi dan kontribusi masyarakat; ketepatan proses dalam mematuhi aturan yang berlaku dan pembagian tugas; serta manfaat yang diperoleh masyarakat setempat dalam pelaksanaan Program Kali Bersih dan juga perubahan perilaku dalam menjaga dan mengembangkan Tukad Bindu. Keberhasilan pelaksanaan program ini *perlu*

adanya upaya penguatan sistem kelembagaan dalam mengatasi masalah pencemaran sungai serta mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.

Keywords: efektivitas; program kali bersih; tukad bindu

I. Pendahuluan

Rencana pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah upaya pemerintah dalam menjaga peningkatan kualitas kehidupan. Upaya ini telah terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Perpres SDGs). *Sustainable Development Goal's 2030* memiliki tujuan dalam menyelesaikan permasalahan kompleks yang ada di Indonesia. Salah satu permasalahan yang cukup menjadi sorotan adalah lingkungan.

Kondisi Indonesia saat ini dikutip dari laman mongabay.co.id (2018) terkait dengan lingkungan menyatakan bahwa Indonesia tengah mengalami darurat ekologis. Permasalahan pencemaran lingkungan di Indonesia sangatlah beragam, di antaranya mulai dari: banjir, pencemaran sungai, pencemaran udara, pemanasan global, kerusakan hutan, kerusakan ekosistem laut, abrasi, sulitnya air bersih, sampah hingga pencemaran tanah. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil survey litbang Koran Sindo (2018) menyatakan bahwa permasalahan lingkungan di Indonesia yang telah dipaparkan di atas termasuk dalam sepuluh persoalan yang sangat krusial dan menyangkut kualitas kehidupan manusia kedepannya. Hasil survei litbang Koran Sindo menyatakan bahwa sampah masih menjadi problem utama permasalahan lingkungan di Indonesia, dari 10 permasalahan di atas sekitar 40% sampah sangat mempengaruhi permasalahan lingkungan. Di kutip pada laman tirto.id (2017) pada data Direktorat Jendral Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tahun 2015 data diperoleh dari 100 jumlah sungai pada 33 Provinsi di Indonesia. Terdapat sebanyak 52 sungai di Indonesia berada dalam status tercemar berat, sejumlah 20 sungai dalam kondisi tercemar sedang hingga tercemar berat, sebanyak 7 aliran sungai berstatus tercemar ringan hingga tercemar sedang dan 21 aliran sungai di Indonesia berada dalam status memenuhi baku mutu hingga tercemar ringan. Permasalahan pencemaran juga dihadapi oleh Provinsi Bali.

Berdasarkan data yang dilansir dari laman mongobay.co.id (2019) menyatakan bahwa setiap hari Bali menghasilkan sampah mencapai sebesar 4.281-ton atau 1,5 juta ton tiap tahunnya. Sebanyak 50 persen sampah di Bali berasal dari tiga daerah yaitu: Denpasar, Badung dan Gianyar. Sampah memang menjadi akar dari permasalahan pencemaran lingkungan salah satunya pencemaran air sungai. Berdasarkan data yang dikutip dari laman bali.tribunnews.com (2019) menyatakan bahwa 11 sungai di Denpasar makin ke hilir makin tercemar. Hasilnya semua sungai di Denpasar termasuk kategori tercemar ringan, tingkat pencemaran makin tinggi khususnya di bagian hilir sungai. Dari hasil tersebut dilakukan pengujian dari pada 31 titik di 11 sungai yang meliputi *Tukad Mati, Tukad Teba, Tukad Badung, Tukad Ayung, Tukad Guming, Tukad Ketapian, Tukad Bindu, Tukad Rangda, Tukad Punggawa, Tukad Loloan, dan Tukad Ngenjung*. Melirik permasalahan pencemaran lingkungan khususnya sungai di Indonesia, sejatinya pemerintah telah berupaya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Upaya yang dilakukan ialah melalui produk pemerintahan yaitu kebijakan. Salah satu kebijakan dalam upaya mengatasi pencemaran lingkungan adalah Program Kali Bersih (PROKASIH).

Program Kali Bersih merupakan suatu program dilakukan pemerintah dalam mengendalikan pencemaran air sungai dengan tujuan peningkatan kualitas air sungai agar tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Kehadiran Program ini menimbang bahwa kualitas air sungai cenderung menurun akibat meningkatnya beban pencemaran yang bersumber pada kegiatan disepanjang daerah aliran sungai (DAS). PROKASIH telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 35 Tahun 1995 yang berasaskan pada pelestarian fungsi lingkungan perairan sungai untuk menunjang pembangunan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Adapun tujuan dari pelaksanaan program ini diantaranya: a) Terciptanya kualitas air sungai yang baik, sehingga dapat meningkatkan fungsi sungai dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan; b) Terciptanya sistem kelembagaan yang mampu melaksanakan pengendalian pencemaran air secara efektif dan efisien; c) Terwujudnya kesadaran dan tanggungjawab masyarakat dalam pengendalian pencemaran air. Hal ini selaras dengan tujuan rencana pembangunan nasional atau *Sustainable Development Goal's 2030*. Salah satu sungai yang telah menerapkan program tersebut adalah Tukad

(Sungai) Bindu di Kota Denpasar.

Tukad Bindu merupakan sungai yang letaknya di Kelurahan Kesiman, Kota Denpasar. Berdasarkan observasi awal bahwa keadaan Tukad Bindu tercemar, dulunya menjadi tempat pembuangan yang sangat kotor, penuh sampah dan menyieramkan. Berawal dari tahun 2010 sekelompok masyarakat mencoba untuk melakukan penataan Tukad Bindu yang diawali dengan merubah *mind-set* masyarakat sekitaran sungai untuk tidak membuang sampah ke sungai. Hal ini dikarenakan bahwa Tukad Bindu memiliki fungsi dan dapat dimanfaatkan sebagai pengairan persawahan setempat. Penataan yang dilakukan juga merupakan wujud dari pelaksanaan Program Kali Bersih yang diinisiasi oleh pemerintah setempat. Berdasarkan pada kondisi setempat, penelitian ini terfokus dalam menilai kinerja kebijakan terkait dengan pengendalian permasalahan pencemaran sungai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis efektivitas implementasi kebijakan atau program.

Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan atas sebuah program atau kegiatan yang dilaksanakan. Menurut Saxena dalam (Indrawijaya, 2010) mendefinisikan bahwa efektivitas adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah tercapai, hal ini dapat dinyatakan apabila makin besar presentase target yang dicapai maka makin tinggi efektivitasnya. Menurut Subagyo dalam (Budiani, 2018) menyatakan bahwa efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Penjelasan di atas memberikan pemahaman bahwa efektivitas adalah suatu pengukuran atas kegiatan yang dilakukan. Pada sebuah kegiatan atau program, mengukur efektivitas dilakukan dengan membandingkan tujuan kegiatan, sasaran, serta output dari kegiatan yang telah diberlangsungkan. Kesesuaian antara output dan tujuan yang ditetapkan menjadi ukuran dari efektivitas. Efektivitas kebijakan merupakan penilaian atas proses dari implementasi sebuah kebijakan untuk dapat mengetahui keberlangsungan dari kebijakan tersebut. Ukuran tercapainya efektivitas pelaksanaan suatu program dapat diketahui dengan cara membandingkan tujuan program dengan output pelaksanaan. (Nugroho, 2012) menyatakan bahwa terdapat lima kriteria untuk menilai keefektifan pelaksanaan kebijakan maupun program yaitu: (1) Tepat Kebijakan; (2) Tepat Pelaksanaan; (3) Tepat Target; (4) Tepat Lingkungan; dan (5) Tepat Proses.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan menggambarkan suatu kenyataan dari keadaan yang diteliti. Menurut Narbuko & Achmadi (2012: 44) Pendekatan deskriptif berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data, penyajian data, menganalisis data, dan menginterpretasikan. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini, menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah informan sebanyak 12 orang yang mengetahui dan memahami program kali bersih di Tukad Bindu, meliputi: Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) Kota Denpasar, Lurah Kesiman, Kepala Dusun (Abian Nangka Kaja, Abian Nangka Kelod, Dukuh, dan Ujung), Ketua dan Anggota Yayasan Tukad Bindu, Masyarakat di Bantaran Tukad Bindu (3 orang), serta Pengunjung Tukad Bindu (3 orang).

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi non-partisipatif, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini juga menggunakan data sukender yang berasal dari buku, artikel jurnal, dokumen kebijakan terkait dengan program kali bersih. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan. Pengujian keabsahan data yang dilakukan melalui tri angulasi data, diantaranya: membandingkan data hasil pengamatan, data hasil wawancara, dan isi suatu dokumen kebijakan yang berkaitan; membandingkan data hasil wawancara antar kelompok informan; dan menguji derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data yang digunakan.

III. Pembahasan

Efektivitas Program Kali Bersih

Kebijakan Program Kali Bersih (PROKASIH) tertuang dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 35/MENLH/7/1995 dengan tujuan guna peningkatan kualitas sungai dan

penguatan system kelembagaan dalam mengatasi pencemaran. Implementasi kebijakan PROKASIH di Kota Denpasar dilakukan melalui kolaborasi yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar. PROKASIH di Kota Denpasar dilaksanakan dalam bentuk Lomba Kali Bersih se-Kota Denpasar melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan, serta pemberdayaan masyarakat sekitar sungai. Pelaksanaan Prokasih di Tukad Bindu mulai dilaksanakan sejak penataan awal sungai yang dilakukan oleh sekelompok pemuda di bantaran Tukad Bindu. Berdasarkan hasil temuan data di lapangan, adapun penjabaran pelaksanaan program kali bersih di Tukad Bindu sebagai berikut.

Tepat Kebijakan

Ketepatan sebuah kebijakan dapat diukur dan dilihat dari sejauhmana kebijakan telah mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, kesesuaian karakter masalah publik dengan standar dan sasaran kebijakan, serta aktor dalam pelaksanaan kebijakan. Program Kali Bersih adalah kebijakan pelestarian lingkungan dalam mengatasi permasalahan pencemaran sungai. Program ini memiliki tiga sasaran utama yaitu: a) meningkatkan kualitas sungai; b) menurunkan beban limbah dari tiap sumber pencemaran; dan c) menguatkan sistem kelembagaan dalam pelaksanaan program. Implementasi Prokasih dalam mengatasi masalah pencemaran sungai di Tukad Bindu menjadi upaya yang tepat. Hal ini terlihat dari temuan data di lapangan melalui observasi dan hasil wawancara bahwa pelaksanaan program ini telah disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Tukad Bindu dan terlaksana dengan baik. Ketepatan kebijakan prokasih ditinjau dari data sekunder dan data primer, bahwa masalah yang dihadapi telah sesuai dengan karakter kebijakan baik standar maupun sasaran kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara bersama masyarakat setempat bahwa pelaksanaan program ini memberikan kebermanfaatn yang telah dirasakan masyarakat setempat, seperti diantaranya: (1) kualitas sungai menjadi lebih baik; (2) terwujudnya sistem kelembagaan dalam pelaksanaan program (pemerintah, masyarakat dan sektor swasta); (3) terwujudnya kesadaran dan tanggungjawab masyarakat dalam pengendalian sungai dan pelestarian Sumber Daya Air; (4) penunjang dalam pembangunan yang berkelanjutan. Program Kali Bersih yang dilaksanakan di Tukad Bindu, dapat dikatakan sebagai sebuah kebijakan yang tepat, ditinjau dari aktor kebijakan, tujuan dan sasaran kebijakan, karakter masalah yang dihadapi, serta manfaat yang dapat dirasakan dari pelaksanaan kebijakan.

Tepat Target

Implementasi Program Kali Bersih di Tukad Bindu sesuai dengan poin yang tertera dalam kebijakan yang menerangkan bahwa sungai sebagai sebuah lingkungan yang keberadaanya harus dijaga dan dilestarikan. Keadaan di Tukad Bindu dari hasil temuan lapangan sebelum pelaksanaan program sangat memprihatinkan. Tukad Bindu menjadi tempat pembuangan limbah rumah tangga, sampah plastik, bantaran yang kotor, dan angker, padahal Tukad Bindu memiliki peranan yang besar terhadap perairan irigasi persawahan di sekitar bantaran sungai yang harus dijaga keberlangsungannya. Hasil wawancara dengan aktor pelaksana kebijakan menyatakan bahwa pelaksanaan Program Kali Bersih tidak mengalami tumpang tindih kebijakan serta Tukad Bindu menjadi target yang tepat dalam implementasi program. Hasil wawancara juga menyebutkan bahwa Program Kali bersih di Kota Denpasar merupakan sebuah perbaharuan kebijakan yang terfokus dalam pengendalian pencemaran sungai dalam menjaga lingkungan dan sumber daya air, sehingga program ini sangat perlu dilakukan pada seluruh sungai sebagai upaya preventif maupun reprensi dalam mengatasi pencemasan air sungai. Pemilihan Tukad Bindu dalam implementasi program kali bersih merupakan target yang tepat. Selain kondisi sungai yang perlu dirawat dan dijaga, kondisi lingkungan setempat juga siap untuk diintervensi. Keadaan lingkungan, kesadaran dan kontribusi masyarakat, serta sinergitas yang terjalin menjadi kekuatan dalam mencapai tujuan dan keberhasilan implementasi program.

Tepat Pelaksanaan

Ketepatan pelaksanaan kebijakan atau program dapat dilihat dari kerjasama dan sinergitas yang terjalin dalam pelaksanaan kebijakan. Proses implementasi kebijakan tidak hanya dilaksanakan oleh sektor pemerintah, tetapi juga perlu adanya sinergi antar elemen masyarakat. Ditinjau berdasarkan hasil temuan data di lapangan, bahwa pelaksanaan program di Tukad Bindu tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah tetapi juga ada kerjasama yang terjalin dengan beberapa aktor, seperti swasta dan kelompok masyarakat setempat. Wujud sinergi dan kerjasama yang terjalin dapat dijabarkan sebagai berikut.

Pemerintah, membentuk Tim Prokasih dalam perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, hingga

melakukan pendampingan kepada kelompok masyarakat setempat. Pemerintah juga berperan sebagai konsolidasi dalam penataan Tukad Bindu, pembangunan infrastruktur, penerangan jalana di bantaran sungai, serta melakukan koordinasi secara vertikal maupun horizontal antar instansi maupun Perangkat Daerah lain yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Yayasan Tukad Bindu, sebagai pengelola Tukad Bindu secara langsung mengalisisansi keterlibatan empat dusun yang ada disepanjang aliran sungai dalam penataannya. Yayasan juga memiliki peran dalam pengelolaan dan bersinergi dengan berbagai pihak seperti pemerintah, sektor swasta, dan akademisi.

Masyarakat, sebagai aktor pelaksana yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program. Keterlibatan masyarakat mulai dari usulan perencanaan penataan sungai, pengelolaan Tukad Bindu, pelaksanaan kegiatan membersihkan sungai dan bantaran sungai, ikut menjaga kebersihan sungai, dan turut aktif dalam kegiatan yang diberlangsungkan di Tukad Bindu seperti kegiatan sosial budaya, pertanian, serta kegiatan kelompok masyarakat lainnya.

Penjabaran pelaksanaan yang dijabarkan di atas dapat dipahami bawah proses implementasi Program Kali Bersih di Tukad Bindu melalui pelaksanaan yang tepat. Hal ini terlihat dari sinergitas yang terjalin antaran pemerintah, yayasan, sektor swasta, serta masyarakat setempat turut berkontribusi dalam pelaksanaan program, sehingga program ini dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Hal ini merupakan sebuah wujud dari *collaborative governance*. Seperti yang diketahui bahwa *collaborative governance* merupakan sebuah proses kerjasama yang di dalamnya untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama (Subarsono, 2016: 174). Kolaborasi yang terjalin dalam penataan Tukad Bindu terdapat keterlibatan semua pihak diantaranya pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mewujudkan tata kelola di Tukad Bindu

Tepat Lingkungan

Ketepatan lingkungan dalam pelaksanaan kebijakan dapat ditinjau dari lingkungan kebijakan mengenai interaksi lembaga perumus kebijakan dan lembaga pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Selain itu lingkungan eksternal juga berperan dalam proses implementasi kebijakan, seperti persepsi publik atas pelaksanaan kebijakan serta interpretasi masyarakat dalam proses implementasi program.

Implementasi Program Kali Bersih di Tukad Bindu mendapatkan dukungan dari para aktor pelaksana. Hal ini dapat dilihat dari keberlangsungan program dengan adanya sinergitas yang baik antara pemerintah, pihak yayasan, sektor swasta, serta masyarakat setempat. Interaksi dalam implementasi program sangat baik dilakukan melalui rapat dengan lurah maupun yayasan, interaksi juga terjalin melalui media elektronik untuk dapat saling berkoordinasi dalam proses implementasi program di Tukad Bindu. Terjalannya proses interaksi yang baik menjadi salah satu kunci dalam keberhasilan implementasi suatu program, selain interaksi jika dilihat dari aspek lingkungan bahwasanya masyarakat setempat mendukung dan menerima kehadiran program. Berdasarkan hasil wawancara, secara keseluruhan masyarakat merespon positif kehadiran Program Kali Bersih di Tukad Bindu serta ikut berkontribusi dalam pelaksanaan program. Hal ini dilihat dari proses interaksi yang terjalin serta respon dari masyarakat yang begitu antusias, dalam kata lain lingkungan di Sungai Bindu baik itu pemerintah, tokoh adat serta masyarakat setempat menyambut baik kehadiran program. Hal ini menjadi poin terpenting dalam mencapai keberhasilan suatu program yang diimplementasikan. Melalui disposisi dari para aktor pelaksana serta antusias masyarakat yang begitu besar memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan program dan keberhasilan proses implementasi. Lingkungan sosial menjadi elemen penting dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan publik serta mengukur kinerja dari pelaksanaan kebijakan.

Tepat Proses

Ketepatan proses sebuah kebijakan menurut (Nugroho, 2012: 107) terdapat tiga proses diantaranya: 1) *Policy acceptance*, mengenai pemahaman publik terkait dengan isi kebijakan; 2) *Policy adoption*, mengenai aktor pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, dan 3) *Strategic readiness*, mengenai kesiapan aktor menjadi bagian dari kebijakan serta mengimplementasikan kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, bahwa ketiga poin terkait ketepatan proses yang berlangsung dalam pelaksan Program Kali Bersih di Tukad Bindu telah terpenuhi. Pemerintah telah mengintegrasikan kebijakan, memahami isi kebijakan, standar dan sasaran kebijakan, serta karakter

masalah yang dihadapi. Sebagai wujud *policy acceptance* bahwa, masyarakat menunjukkan sikap penerimaan dan mendukung pelaksanaan program di Tukad Bindu. Mengimplementasikan kebijakan dalam mengatasi permasalahan pencemaran sungai di Kota Denpasar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar juga membentuk TIM Prokasih sebagai wujud *policy adoption*. Dimana proses yang berlangsung mulai dari perencanaan, sosialisasi program kepada masyarakat, pelaksanaan program, pendampingan masyarakat, kontroling serta evaluasi program. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa proses yang berlangsung telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, selain itu masyarakat turut berkontribusi dalam pelaksanaan program. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program terlihat dari kesiapan dan upaya yang dilakukan dalam penataan, pemeliharaan, pengembangan, serta pelaksanaan kegiatan di Tukad Bindu. Partisipasi masyarakat setempat dan sinergi dari pemerintah merupakan bentuk dari kesiapan aktor dalam mengimplementasikan kebijakan guna mencapai tujuan program dalam penataan sungai dan penyelesaian masalah pencemaran sungai.

Manfaat Pelaksanaan Prokasih di Tukad Bindu

Efektivitas Program Kali Bersih selain ditinjau melalui indikator lima tepat, keberhasilan implementasi juga dapat dilihat salah satunya dari perubahan yang dialami seperti perubahan perilaku dari penerima program. Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi Program Kali Bersih di Tukad Bindu memberikan begitu banyak manfaat serta perubahan yang sangat signifikan pada tata kelola Tukad Bindu yang dirasakan oleh masyarakat setempat. Perubahan lainnya juga dapat dilihat dari tumbuhnya kesadaran masyarakat setempat dan rasa tanggungjawab dalam memelihara dan mengendalikan pencemaran di Tukad Bindu. Masyarakat turut berperan aktif dalam mengelola dan menata lingkungan. Antusias masyarakat yang begitu tinggi menjadi poin penting dalam implementasi program ini, sehingga target dari Program Kali Bersih di Kota Denpasar dalam bidang pembangunan dapat dicapai.

Keberhasilan pelaksanaan program dan potensi alam serta sosial yang dimiliki, mendukung pengembangan Tukad Bindu menjadi salah satu objek wisata sungai di Kota Denpasar. Wujud pengembangan telah dilakukan melalui pemanfaatan dan pengelolaan bantaran Tukad Bindu sebagai tempat bersantai, bermain, dan berolahraga bagi masyarakat sekitar dan pengunjung. Penataan ini juga memberikan dampak positif terhadap pengembangan daerah serta optimalisasi fungsi sungai. Tukad Bindu kini dikenal sebagai objek wisata dengan memanfaatkan konservasi sungai sebagai wujud wisata edukasi lingkungan.

Kelurahan Kesiman dan masyarakat di bantaran Tukad Bindu juga merancang inovasi pelayanan publik melalui penataan Tukad Bindu yaitu “Senyum Melia di Tubin”. Inovasi ini merupakan wujud pemberdayaan masyarakat dalam mengelola dan menjaga lingkungan khususnya Tukad Bindu. Melalui inovasi ini, ada harapan bahwa sungai yang bersih dan tertata berpengaruh kepada semua komponen, yaitu: kesehatan, ekosistem, biota, kelestarian, serta kemandirian masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Melalui penataan dan pengelolaan yang dilakukan pada Tukad Bindu, terdapat pula berbagai manfaat lainnya berupa pengembangan yang berbasiskan pada pemberdayaan masyarakat. Adapun diantaranya, dijabarkan pada tabel berikut.

Table 1. Daftar Pengembangan di Tukad Bindu

Bidang Pengembangan	Deskripsi	Keterangan
Ekonomi Kreatif	Pemberdayaan masyarakat sekitar dengan tersedianya akses untuk berjualan di bidang kuliner untuk peningkatan perekonomian masyarakat.	

Wisata Edukasi
Terdapat kegiatan edukasi anak-anak dalam bentuk outing class terkait kebersihan lingkungan dan sungai pada usia dini. Tersedia pula wahana bermain dalam menunjang kegiatan belajar dan bermain.



Wisata Sosial Budaya
Tersedianya akses dalam kegiatan sosial, seperti halnya: acara rapat, gathering, lomba, yoga, senam, pentas seni, dan budaya yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung maupun wisatawan setempat.



Pertanian
Pengembangan diri kepada kaum perempuan khususnya kelompok Ibu PKK di sekitar bantaran Tukad Bindu melalui kegiatan bercocok tanam.



Perikanan
Pengembangan diri kepada kelompok masyarakat setempat dalam berternak ikan air tawar.



IV. Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Kali Bersih di Tukad Bindu Kelurahan Kesiman Kota Denpasar sangat efektif dilaksanakan. Program ini telah mampu memenuhi lima indikator efektivitas pelaksanaan program yang menjadi alat ukur penelitian. Kebijakan ini juga telah sesuai dengan karakter masalah yang dihadapi serta telah mampu menyelesaikan masalah pencemaran sungai di Tukad Bindu. Proses implementasi dan kondisi lingkungan dalam implementasi program sangat tepat dilakukan di Tukad Bindu, hal ini terbukti dengan adanya jalinan sinergi antara Pemerintah, Yayasan Tukad Bindu, sektor swasta, serta masyarakat setempat untuk mendukung pelaksanaan program. Efektifnya pelaksanaan program merupakan wujud pembangunan, yang dimana memberikan manfaat kepada lingkungan dalam hal penataan Tukad Bindu, serta manfaat sosial seperti perubahan perilaku masyarakat, partisipasi dalam menjaga kebersihan sungai, dan pengembangan Tukad Bindu menjadi objek wisata sungai. Adapun target yang tertuang dalam kebijakan juga telah terlihat dalam keberhasilan pelaksanaan program di Tukad Bindu. Untuk mengoptimalkan kinerja kebijakan, terdapat pula beberapa saran yang dapat disampaikan dalam mengoptimalkan pelaksanaan program, diantaranya: (1) perlu adanya pemerataan dalam pelaksanaan program khususnya penataan sungai; (2) perlu adanya pengembangan dan penataan akses dalam mengembangkan Tukad Bindu sebagai objek wisata; (3) pelaksanaan program kali bersih perlu diterapkan pada sungai-sungai lainnya di Kota Denpasar dalam mewujudkan pembangunan lingkungan, (4) penguatan sistem kelembagaan dalam mengatasi pencemaran dalam rencana jangka panjang, serta (5) mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga sungai serta mewujudkan pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Bali.tribunnews. 2019. *11 Sungai di Denpasar Makin ke Hilir Makin Tercemar, 3 Titik Pantai Airnya Keruh*. <https://bali.tribunnews.com/2019/07/09/11-sungai-di-denpasar-makin-ke-hilir-makin-tercemar-3-titik-pantai-airnya-keruh>. Diakses pada tanggal 2 September 2019, Pukul 10:46 Wita.
- Budiani, N. W. (2018). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "EKA TARUNA BHAKTI" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 49-57.
- Indrawijaya. (2010: 97). *Perilaku Organisasi*. Bandung: Sinar Baru.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: Kep-35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih.
- Mangobay.co.id. 2018. *Walhi: Kondisi Indonesia Masih Darurat Ekologis*. <https://www.mongabay.co.id/2018/04/24/walhi-kondisi-indonesia-masih-darurat-ekologis/>. Diakses pada tanggal 2 September 2019, Pukul 08:41 Wita.
- Mongobay.co.id. 2019. *Inilah Data dan Sumber Sampah Terbaru di Bali*. <https://www.mongabay.co.id/2019/07/02/inilah-data-dan-sumber-sampah-terbaru-di-bali/>. Diakses pada tanggal 2 September 2019, Pukul 10:45 Wita.
- Narbuko, C., & Achmadi, H. A. (2012: 44). *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT. Media Komputindo.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- Sindo, K. (2018). *10 Problem Besar Lingkungan di Indonsia*. Sindonews.com. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2019, Pukul 09:53 Wita.
- Subarsono, A. (2016: 174). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tirto.id. 2017. *Suram Mutu Air Indonesia*. <https://tirto.id/suramnya-mutu-air-sungai-indonesia-cmnr>. Diakses pada tanggal 2 September 2019, Pukul 09:38 Wita.